

KONSEP KEADILAN TUHAN (AL-'ADL) DALAM TEOLOGI MU'TAZILAH DAN KRITIK KONTEMPORER

Alya Nurhalimah¹, Diaz Bily Herlambang², Fadly Yusuf Thoziry³, Nurkhalistiani Fauziyyah⁴

¹⁻⁴Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

¹alyanurhalimah175@gmail.com, ²diazbilyberlambang007@gmail.com,

³fadlyyusuft@gmail.com, ⁴kalissasing@gmail.com

Abstrak

Mazhab *Muktazilah* muncul sebagai respons teologis terhadap tantangan intelektual abad ke-8 M, mengusung prinsip rasionalitas dalam memahami ajaran Islam. Penelitian ini menganalisis akar historis kemunculan *Muktazilah* dari konteks sosiopolitik Dinasti Umayyah hingga pembentukan lima prinsip fundamentalnya (*al-ushul al-khamsah*). Melalui pendekatan historis-analitis, kajian ini menunjukkan bahwa *Muktazilah* tidak hanya mengembangkan sistem teologi yang koheren, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan filsafat dan sains dalam peradaban Islam. Pengaruh metodologi rasional *Muktazilah* terhadap tradisi keilmuan Islam menciptakan fondasi epistemologis yang memungkinkan *florisannya* pemikiran filosofis dan saintifik pada masa kejayaan Islam.

Kata kunci: *Muktazilah*, teologi Islam, rasionalitas, *al-ushul al-khamsah*, peradaban Islam.

Article History

Received: July 2025

Reviewed: July 2025

Published: July 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI: Prefix DOI:

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright: Author

Publish by: Tashdiq



This work is licensed

under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Mazhab *Mu'tazilah* memiliki posisi istimewa dalam sejarah teologi Islam karena bergantung pada prinsip rasionalitas dan moralitas dalam pengertian ajaran agama. Berdiri pada awal abad ke-8 M oleh Wasil bin 'Atha di lingkungan intelektual Basrah, mazhab ini hadir sebagai respon kritis terhadap teologisasi yang timbul akibat perdebatan tentang takdir, keadilan Tuhan, dan masa depan pelaku dosa besar. Di sini, *Mu'tazilah* tidak hanya memberikan strategi alternatif untuk memahami wahyu, tetapi mereka juga membangun sistem teologi yang sistematis dan rasional melalui apa yang sekarang dikenal sebagai *Ushul al-Khamsah* (Lima Prinsip Dasar) (Mighfaza, 2021).

Selain itu, mazhab *Asy'ariyah* menyimpan wahyu atas rasio, namun *Mu'tazilah* memperkuat akal sebagai alat sebenarnya yang digunakan dalam mengukur kebenaran dan keadilan bahkan sebelum datangnya wahyu (Syamsuddin, 2022). Pada dasarnya, manusia dianggap sebagai makhluk rasional yang dapat membedakan baik dan buruk secara mandiri. Perspektif ini menghasilkan sistem nilai yang menempatkan kebebasan, kewajiban moral, dan keadilan Tuhan—pemikiran-pemikiran ini tidak hanya paling dalam di dalam teks-teks keislaman, tetapi juga sangat berhubungan dengan tradisi filsafat Yunani, lebih-lebih logika *Aristotelian*.

Dalam lingkungan masyarakat kontemporer yang ditandai oleh kompleksitas relasi agama, negara, dan masyarakat, penalaran *Mu'tazilah* meledaknya kembali sebagai referensi intelektual yang relevan dalam menjawab persoalan-persoalan seperti pluralisme, kebebasan beragama, serta keadilan sosial (SAMBAS, 2025). Penelitian-penelitian baru menonjolkan

kemampuan doktrinal *Ushul al-Khamsah* sebagai kerangka analitis dalam pemahaman konstruksi etika publik dan tanggung jawab kolektif umat beragama dalam masyarakat modern.

Salah satu aspek yang paling substansial dari analisis terhadap *Mu'tazilah* adalah keberanian mereka untuk mereformulasi konsep-konsep ketuhanan tradisional dengan tahapan yang rasional tanpa menghilangkan unsur transendensi wahyu. *Mu'tazilah* tidak membuktikan wahyu secara langsung dengan akal, melainkan mereka menghadirkan wahyu di lapangan yang dapat diverifikasi dengan penalaran yang sehat. Selain itu, *Mu'tazilah* juga memiliki posisi epistemologis yang menarik: tidak hanya rasionalistik, tetapi juga etis. Akal tidak hanya digunakan untuk memahami kebenaran, tetapi juga digunakan untuk menegakkan nilai keadilan dalam kehidupan manusia.

Keberanian *Mu'tazilah* memandang teks-teks agama dari lensa akal juga menciptakan polemik dalam sejarah Islam, terutama di zaman Mihnah—sebuah era inkuisisi di bawah zaman Khalifah Al-Ma'mun yang mewajibkan doktrin kemakhlukan Al-Qur'an sebagai ortodoksi. Polemik ini menjadi titik balik dalam hubungan antara kekuasaan dan otoritas teologis, dengan *Mu'tazilah* muncul sebagai simbol rasionalisasi doktrin, disamping menjadi korban politik. *Phenomenon* ini mengungkapkan bahwa penalaran rasional dalam Islam tidak selalu mendapatkan tempat yang tenang dalam sistem politik tradisional (SAMBAS, 2025)

Dengan demikian, kajian terhadap *Ushul al-Khamsah* bukan hanya mengandung nilai akademik, tetapi juga relevansi sosiologis dan politis yang mendalam. Teologi tidak lagi dilihat sebagai doktrin kaku, melainkan sebagai medan dialektika antara nalar, wahyu, dan realitas. Oleh sebab itu, penting untuk menempatkan lima prinsip *Mu'tazilah* dalam konteks yang lebih luas—yakni bagaimana prinsip-prinsip tersebut beroperasi dalam kehidupan umat beragama yang dinamis, kompleks, dan terus berubah. Inilah yang menjadi spirit utama dari artikel ini: menghidupkan kembali rasionalitas Islam dengan pendekatan historis-kritis dan reflektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), karena seluruh objek kajian bersumber dari teks-teks klasik dan literatur ilmiah yang membahas pemikiran teologi Islam, khususnya mazhab *Mu'tazilah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelusuri konsep keadilan Tuhan (*al-'Adl*) dalam kerangka epistemologi rasional *Mu'tazilah*, serta menganalisis kritik-kritik kontemporer terhadapnya dalam konteks problem kejahatan, kebebasan manusia, dan otoritas wahyu. Oleh karena itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dimensi historis, filosofis, dan teologis secara mendalam melalui penelusuran literatur, baik primer maupun sekunder.

Sumber primer dalam penelitian ini mencakup karya-karya penting dari para tokoh *Mu'tazilah* seperti *Al-Mughni fi Abwab al-Tawhid wa al-'Adl* karya Qadhi Abdul Jabbar dan Kitab *al-Usul* karya Abu al-Husayn al-Khayyat, yang menjadi representasi utama dalam artikulasi doktrin *al-'Adl*, *khalq al-af'al*, dan *al-tawhid*. Di samping itu, digunakan pula kutipan dari tokoh oposisi seperti Abu al-Hasan al-Ash'ari dalam *Maqalat al-Islamiyyin* sebagai bahan kontras pemikiran. Sumber-sumber ini diperkaya dengan rujukan kontemporer dari para pemikir modern seperti Harun Nasution, Fazlur Rahman, dan Richard C. Martin, yang mengkaji warisan *Mu'tazilah* dalam perspektif historis dan etis.

Proses analisis dilakukan melalui pendekatan analisis isi (*content analysis*) dan interpretasi kritis. Analisis isi digunakan untuk menelaah struktur argumen, penggunaan logika, dan definisi konsep-konsep kunci yang membentuk sistem teologi *Mu'tazilah*. Sementara itu, interpretasi kritis digunakan untuk mengevaluasi relevansi pemikiran tersebut terhadap isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan *problem teodise* (*problem of evil*). Penelitian ini juga mempertimbangkan konteks sosio-politik kemunculan doktrin-doktrin *Mu'tazilah*, terutama melalui studi peristiwa *mihnah* yang menunjukkan relasi erat antara

teologi dan kekuasaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan reflektif terhadap dinamika internal dan eksternal pemikiran *Mu'tazilah*.

Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menggambarkan dengan jelas bagaimana rasionalitas ditempatkan sebagai sumber kebenaran teologis dalam mazhab *Mu'tazilah*, serta sejauh mana argumen mereka dapat dipertahankan dalam konteks pemikiran Islam modern yang lebih plural, kontekstual, dan kritis terhadap absolutisme keagamaan.

PEMBAHASAN

1. Akar Historis dan Filosofis

Kemunculan mazhab *Muktazilah* tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosiopolitik yang kompleks pada abad ke-8 Masehi. Konteks historis menunjukkan bahwa gerakan ini lahir sebagai respons terhadap krisis legitimasi yang dialami Dinasti Umayyah, khususnya pasca-tragedi Karbala dan berbagai kontroversi teologis yang mengemuka. Wasil ibn (Ata') (699-748 M), yang dianggap sebagai pendiri mazhab ini, mengembangkan posisi teologis yang berupaya melampaui dikotomi ekstrem antara *Khawarij* dan *Murji'ah* dalam memandang status orang beriman yang melakukan dosa besar.

Sebagaimana dicatat dalam sumber-sumber historis, Wasil sebagai pemuda pergi ke Basra, Irak, di mana ia belajar di bawah bimbingan *asketek* terkemuka Hasan al-Basri dan bertemu dengan tokoh-tokoh agama berpengaruh lainnya yang tinggal di sana. Perjalanan intelektual ini menjadi fondasi bagi pengembangan metodologi teologis yang kemudian menjadi ciri khas *Muktazilah*.

Secara filosofis, *Muktazilah* mengadopsi dan mengadaptasi tradisi pemikiran Yunani, khususnya logika *Aristotelian* dan etika *Stoik*, untuk membangun kerangka teologis yang rasional. Proses ini tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan melalui interaksi intensif dengan berbagai tradisi intelektual yang berkembang di wilayah kekuasaan Islam. Penerjemahan karya-karya filosofis Yunani ke dalam bahasa Arab pada periode ini memberikan *tools* konseptual yang memungkinkan para teolog *Muktazilah* untuk mengembangkan argumentasi yang lebih *sophisticated*.

Yang menarik adalah bagaimana *Muktazilah* berhasil menjembatani antara wahyu dan akal tanpa mengorbankan salah satunya. Mereka mengembangkan *hermeneutika* yang memungkinkan interpretasi rasional terhadap teks-teks suci sambil tetap mempertahankan otoritas wahyu. Hal ini tercermin dalam konsep *al-husn wa al-qubh al-'aqliyyan* (kebaikan dan keburukan yang dapat dipahami melalui akal), yang menjadi salah satu pilar fundamental pemikiran mereka.

Konteks historis juga menunjukkan bahwa *Muktazilah* mendapat dukungan politik dari beberapa khalifah Abbasiyah, khususnya pada masa *mihnat* (inkuisisi) yang dipimpin oleh al-Ma'mun. Dukungan politik ini memungkinkan penyebaran dan institusionalisasi pemikiran *Muktazilah* dalam berbagai lembaga pendidikan dan birokrasi pemerintahan, meskipun pada akhirnya justru menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada kemunduran mereka ketika dukungan politik tersebut dicabut.

Signifikansi historis *Muktazilah* juga tercermin dalam karya-karya dokumentatif yang ditulis oleh para kritikus mereka. Abu al-Hasan al-Ash'ari (al-Hasan, 1950) dalam karyanya "*Maqalat al-Islamiyyin*" memberikan dokumentasi komprehensif tentang berbagai aliran teologis Islam awal, termasuk *Muktazilah*. Ironisnya, al-Ash'ari sendiri pernah belajar di bawah bimbingan Abu Ali al-Jubba'i, salah satu tokoh terkemuka *Muktazilah*, sebelum kemudian mengembangkan mazhab teologis yang berbeda.

Menariknya, pengaruh metodologi *Muktazilah* terhadap tradisi keilmuan Islam dapat ditelusuri melalui berbagai jalur transmisi intelektual. Bahkan Abu al-Hasan al-Ash'ari, yang kemudian menjadi kritikus utama *Muktazilah*, mengakui dalam "*Maqalat al-Islamiyyin*" bahwa ia pernah menjadi pengikut setia mazhab ini selama empat puluh tahun hidupnya sebelum mengembangkan orientasi teologis yang berbeda.

2. *Ushul al-Khamsah* (Lima Prinsip Teologis *Mu'tazilah*)

Kelima prinsip dasar teologi *Mu'tazilah* bukan hanya ajaran normatif, tetapi juga merupakan landasan metodologis yang mengekspresikan etika Islam yang rasional. Setiap prinsip dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai Tuhan, manusia, dan keadilan.

1) *Al-Tawhid* (Ke-Esa-an Tuhan)

Dalam pemikiran *Mu'tazilah*, prinsip *al-Tawhid* bukan hanya menegaskan keesaan Tuhan secara ontologis, melainkan juga secara epistemologis. *Mu'tazilah* menolak segala jenis *antropomorfisme* (*tasybih*) dan percaya bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat berdiri sendiri di luar *dzat*-Nya (Mighfaza, 2021). Penolakan pada konsep sifat azali ini bertujuan menjaga kemurnian tauhid dan menghindari penyamakan Tuhan dengan makhluk. Prinsip ini dalam konteks kekinian dapat dijadikan landasan untuk membangun dialog antaragama yang menekankan transendensi Tuhan di atas simbol-simbol partikular.

2) *Al-'Adl* (Keadilan Ilahi)

Prinsip ini adalah sentralitas gravitasi dalam teologi *Mu'tazilah*. Mereka yakin bahwa Tuhan berhak bertindak adil dan tidak dapat berbuat kejam (Syamsuddin, 2022). Ini berlawanan dengan *Asy'ariyah* yang menyatakan bahwa apa saja yang dilakukan Tuhan adalah adil karena kehendak-Nya mutlak. *Mu'tazilah* sebaliknya menekankan bahwa keadilan baru bermakna jika manusia memiliki kebebasan memilih. Konsep ini menjadi pijakan penting dalam diskursus etika politik, keadilan sosial, dan HAM.

3) *Al-Wa'd wa al-Wa'id* (Janji dan Ancaman)

Mu'tazilah menegaskan bahwa janji pahala dan ancaman siksa dari Tuhan bersifat pasti (Mighfaza, 2021) (merujuk pada penolakan terhadap pandangan *Murji'ah* dan menekankan finalitas keputusan moral Tuhan terhadap manusia). Pelaku dosa besar yang tidak bertaubat akan kekal di neraka sebagai bentuk keadilan yang tidak dapat dibatalkan. Ini menandai sebuah sistem moral berbasis tanggung jawab individual yang tegas dan konsisten.

4) *Al-Manzilah bayna al-Manzilatayn* (Status di Antara Dua Status)

Doktrin ini menegaskan bahwa pelaku dosa besar berada pada posisi netral antara mukmin dan kafir (SAMBAS, 2025) (dalam konteks ini, *Mu'tazilah* menghindari ekstremisme *Khawarij* maupun kelonggaran *Murji'ah* dengan membentuk posisi teologis moderat). Posisi ini membuka ruang bagi inklusi teologis dan memungkinkan pemisahan antara kesalahan moral dengan kekafiran dogmatis.

5) *Al-Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahy 'an al-Munkar* (Menyeru Kebaikan dan Mencegah Kemungkaran)

Prinsip ini menetapkan tugas moral dan kolektif untuk menegakkan kemurahan dan melawan keburukannya, bahkan penguasa tiran (Syamsuddin, 2022) (prinsip ini menjadikan amar makruf sebagai alat teologis ataupun politis untuk perlawanan atas otoritas yang menindas). Pada tingkat yang modern, prinsip ini memberi legitimasi teologis pada gerakan sosial, aktivisme keagamaan, dan reformasi politik dengan sisi berpihak kepada keadilan.

Selain sebagai prinsip-prinsip teologis, *Ushul al-Khamsah* juga dapat dibaca sebagai kerangka etika publik. Sebagai contoh, doktrin *al-Adl* tidak hanya aktif pada struktur metafisika keilahian, tetapi juga menjadi landasan sistem hukum dan perundang-undangan yang adil dan

humanistik. Jika Tuhan saja harus adil, maka sistem sosial buatan manusia semata-mata harus mengakomodasi nilai keadilan substantif.

Demikian pula prinsip *al-Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahy 'an al-Munkar* membuka pintu untuk etika resistensi terhadap kekuasaan korup dan menindas. Di tradisi *Mu'tazilah*, amar makruf bukan nasihat moral semata, tetapi alasan teologis untuk melakukan kritik sosial dan bahkan oposisi terhadap rezim otoriter. Prinsip ini oleh karena itu aktual dengan dinamika masa kini di negara-negara Muslim yang berjuang memperkuat demokrasi dan partisipasi publik (Syamsuddin & Ahmad, 2022).

3. Titik Kritis Kontroversial dalam Teologi *Mu'tazilah*

Problematisasi Kejahatan dan Implikasi terhadap Konsep Keadilan Ilahi

Masalah kejahatan merupakan tantangan klasik dalam diskursus teologi, baik di tradisi Islam maupun agama-agama besar lainnya. Dalam pandangan *Mu'tazilah*, problem ini dijawab dengan menempatkan kehendak manusia sebagai faktor utama dalam lahirnya tindakan buruk. Mereka meyakini bahwa Tuhan tidak menciptakan perbuatan manusia, melainkan manusia sendirilah yang menciptakan tindakannya melalui kehendak dan pilihan bebasnya (*ikhtiyar*). Dengan kata lain, manusia adalah pelaku moral otonom yang bertanggung jawab atas amal perbuatannya. Seperti ditegaskan oleh Sulistio (2024), "Perbuatan manusia, menurut *Mu'tazilah*, berasal dari dirinya sendiri dan bukan diciptakan oleh Tuhan" (hlm. 4).

Doktrin ini sekaligus menjadi basis bagi prinsip *al-'Adl* (keadilan Tuhan), sebab Tuhan hanya dapat disebut adil apabila manusia benar-benar memiliki kebebasan untuk memilih dan bertindak. Jika Tuhan menciptakan kejahatan dan kemudian menghukum pelakunya, maka keadilan Ilahi akan berubah menjadi kezaliman. Di sinilah letak distingsi utama antara *Mu'tazilah* dengan *Asy'ariyah*, yang justru berpandangan bahwa semua perbuatan, baik dan buruk, adalah ciptaan Tuhan—sehingga keadilan Tuhan bukan karena perbuatan-Nya adil menurut akal, tetapi karena apa pun yang Tuhan lakukan pasti adil berdasarkan kehendak-Nya. Konsekuensinya, bagi *Mu'tazilah*, keadilan harus dapat diverifikasi secara rasional. Pendekatan ini memberi kontribusi besar terhadap gagasan etika rasional dan keadilan objektif dalam teologi Islam, terutama dalam konteks keadilan sosial dan hak asasi manusia.

Paradoks Kemahakewenangan Ilahi dalam Perspektif Rasionalitas *Mu'tazilah*

Paradoks ini merujuk pada dilema yang muncul ketika atribut Tuhan dibawa pada ujian logika ekstrem, seperti pertanyaan: "Apakah Tuhan bisa menciptakan batu yang tidak bisa ia angkat?" atau "Apakah Tuhan bisa berlaku zalim?" Bagi *Mu'tazilah*, kemahakewenangan Tuhan tidak berarti kebebasan mutlak yang melampaui hukum akal. Mereka justru percaya bahwa Tuhan tidak bisa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan esensi-Nya, seperti berlaku zalim, karena itu merupakan kontradiksi terhadap sifat keadilan-Nya yang absolut.

Dalam argumen ini, logika bukanlah batasan atas kekuasaan Tuhan, tetapi cerminan dari kesempurnaan-Nya. Sulistio (2024) menekankan bahwa "Tuhan tidak mungkin menciptakan kezaliman karena hal itu bertentangan dengan esensi keadilan-Nya" (hlm. 6). Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan Tuhan bersifat teratur, bukan sewenang-wenang. Sebaliknya, dalam teologi *Asy'ariyah*, tindakan Tuhan tidak tunduk pada kategori rasionalitas manusia; Tuhan bisa saja menyiksa anak kecil yang tidak berdosa, dan itu tetap dianggap adil karena Tuhan adalah sumber kebenaran itu sendiri.

Pandangan *Mu'tazilah* ini sering dianggap lebih sejalan dengan gagasan keadilan universal dan keteraturan moral yang konsisten. Dalam diskursus kontemporer, pendekatan ini memberikan justifikasi moral yang kuat terhadap tuntutan etika publik dan sistem hukum yang menolak absolutisme kuasa atas nama agama.

Kemakhlukan Al-Qur'an sebagai Isu Teologis dan Alat Legitimasi Politik

Salah satu doktrin paling kontroversial dalam pemikiran *Mu'tazilah* adalah pandangan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, bukan *qadim*. Bagi *Mu'tazilah*, kalam Tuhan merupakan ciptaan yang diciptakan Tuhan dalam waktu tertentu, bukan sesuatu yang azali dan menyatu dengan *Dzat*-Nya. Pandangan ini lahir dari kehati-hatian teologis terhadap konsep keesaan Tuhan: Jika Al-Qur'an *qadim* dan berbeda dari *Dzat* Tuhan, maka ada dua yang *qadim*, dan itu bertentangan dengan prinsip *tawhid*. Karena itu, doktrin ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga kemurnian tauhid sebagaimana ditegaskan dalam *Ushul al-Khamsah*.

Namun, pandangan ini tak lepas dari implikasi sosial-politik yang besar. Pada masa pemerintahan Abbasiyah, terutama era Khalifah al-Ma'mun (813-833 M), doktrin Qur'an sebagai makhluk dijadikan sebagai kebijakan resmi negara dan digunakan untuk menundukkan para ulama yang menolak pandangan rasionalis. Peristiwa ini dikenal dengan *mihnah*—semacam inkuisisi teologis—yang berdampak pada penindasan intelektual dan pemaksaan ideologi. Seperti dicatat Sulistio (Sulistio, 2024), "Pada masa kekhalifahan al-Ma'mun, pandangan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk menjadi alat politik negara untuk membungkam otoritas keagamaan tradisional" (hlm. 7).

Meskipun kontroversial, gagasan ini memberi kontribusi penting bagi pendekatan historis dalam memahami teks wahyu. Al-Qur'an dipandang bisa ditafsirkan dalam konteks ruang dan waktu, sehingga terbuka peluang untuk penafsiran progresif sesuai kebutuhan sosial yang berkembang. Dalam era modern, doktrin ini menginspirasi gerakan hermeneutika kontekstual yang menekankan pentingnya memahami pesan ilahi dalam bingkai budaya, sejarah, dan realitas sosial. Meski demikian, banyak kalangan ortodoks menganggapnya berbahaya karena dianggap membuka ruang relativisme tafsir dan melemahkan kemutlakan teks suci.

Meskipun demikian, *al-Manzilah bayna al-Manzilatayn* merupakan kontribusi besar terhadap moderasi beragama dalam diskursus keagamaan saat ini. Alih-alih memenjarakan biner (mukmin-kafir), prinsip ini justru memberikan ruang zona abu-abu untuk membuka diri terhadap dialog dan toleransi bagi kehidupan masyarakat multikultural. Pemikiran ini dapat digunakan sebagai landasan teologis menghadapi gejala *takfiri* (mudah mengkafirkan) yang semakin meruncing dalam diskursus keislaman kontemporer (SAMBAS, 2025).

4. Kritik dari Madzhab Lain

Konsep keadilan Tuhan *Mu'tazilah*, yang sangat menekankan peran akal dan kebebasan manusia, tidak luput dari kritik tajam dari mazhab-mazhab teologi lain, terutama *Asy'ariyah* dan *Maturidiyah*. Kritik-kritik ini seringkali berakar pada perbedaan fundamental dalam memandang hubungan antara kehendak Tuhan, kehendak manusia, dan sifat-sifat ilahiah.

1) Kritik dari Madzhab *Asy'ariyah*

Asy'ariyah muncul sebagai reaksi terhadap rasionalisme *Mu'tazilah*. Mereka cenderung menekankan kemahakuasaan (*Qudrah*) dan kehendak mutlak (*Iradah*) Tuhan di atas segalanya.

a. Tentang Penciptaan Perbuatan (*Khalq al-Afal*): *Asy'ariyah* secara tegas menolak pandangan *Mu'tazilah* bahwa manusia adalah pencipta perbuatannya sendiri. Bagi *Asy'ariyah*, segala sesuatu, termasuk perbuatan baik dan buruk manusia, sepenuhnya diciptakan oleh Tuhan (*Allah khaliq kulli syai'in*). Manusia hanya "*mengkasb*" (mengupayakan/mengambil) perbuatan yang telah diciptakan Tuhan. Jika manusia adalah pencipta perbuatannya sendiri, hal itu akan membatasi kemahakuasaan Tuhan dan menyiratkan adanya "pencipta" lain selain Tuhan (Netton, 2013).

b. Implikasi Kritik: Jika Tuhan adalah pencipta segala perbuatan, maka bagaimana keadilan-Nya terwujud jika manusia dihukum atas perbuatan yang bukan ciptaannya? *Asy'ariyah* menjawab bahwa keadilan Tuhan tidak dapat diukur dengan standar akal manusia. Apa yang Tuhan lakukan adalah adil semata-mata karena Ia adalah Tuhan.

Konsep keadilan bagi *Asy'ariyah* lebih merupakan atribut yang inheren pada Tuhan, bukan prinsip yang harus dipahami melalui rasionalitas manusiawi yang terbatas. Keadilan Tuhan adalah "apa pun yang Dia kehendaki." (Batara dkk., 2025).

- c. Tentang *Al-Aslah* (Yang Terbaik): *Asy'ariyah* juga menolak konsep *al-aslah Mu'tazilah* yang menyatakan bahwa Tuhan harus melakukan yang terbaik bagi hamba-Nya. Bagi *Asy'ariyah*, Tuhan tidak terikat oleh kewajiban apa pun. Tuhan Maha Kuasa dan berkehendak mutlak; Ia tidak "harus" melakukan sesuatu, bahkan yang terbaik sekalipun. Tuhan bisa saja memilih untuk tidak menciptakan manusia sama sekali, dan itu tetap adil karena Ia adalah Tuhan. Gagasan *Mu'tazilah* seolah membatasi kehendak Tuhan.
 - d. Tafsir Ayat-Ayat Al-Qur'an: *Asy'ariyah* berpendapat bahwa *Mu'tazilah* terlalu mengandalkan akal dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits, bahkan sampai mengesampingkan makna *zhahir* (literal) teks. Mereka menuduh *Mu'tazilah* melakukan *ta'wil* (penafsiran metaforis) yang berlebihan terhadap ayat-ayat yang secara *zhahir* menunjukkan kemahakuasaan mutlak Tuhan atas segala sesuatu, termasuk perbuatan manusia (Ikhar, 2013).
- 2) Kritik dari Mazhab *Maturidiyah*
- Maturidiyah*, meskipun memiliki kesamaan dengan *Asy'ariyah* dalam menolak rasionalisme ekstrem *Mu'tazilah*, namun cenderung lebih moderat dan berusaha mencari titik tengah.
- a. Tentang Penciptaan Perbuatan (*Khalq al-Afal*): *Maturidiyah* sepakat dengan *Asy'ariyah* bahwa Tuhan adalah pencipta segala sesuatu, termasuk perbuatan manusia. Namun, mereka memberikan ruang yang lebih besar bagi kehendak dan pilihan manusia daripada *Asy'ariyah*. *Maturidiyah* membedakan antara *khalq* (penciptaan) dan *kasb* (usaha/perolehan). Tuhan menciptakan kekuatan dan kemampuan dalam diri manusia (*qudrah al-ihiyariyyah*), dan manusia memiliki pilihan untuk menggunakan kekuatan tersebut untuk melakukan perbuatan. Jadi, Tuhan menciptakan kemampuan, dan manusia memilih untuk menggunakannya. Dengan demikian, manusia bertanggung jawab atas pilihan mereka (Syawal Kurnia Putra dkk., 2023).
 - b. Implikasi Kritik: *Maturidiyah* mencoba mengatasi dilema keadilan Tuhan dan kebebasan manusia dengan menekankan bahwa meskipun Tuhan menciptakan potensi dan sarana, pilihan final tetap ada pada manusia. Keadilan Tuhan termanifestasi dalam pemberian kemampuan dan pilihan ini, serta pahala dan siksa yang sesuai dengan pilihan manusia. Mereka berusaha menghindari fatalisme yang sering dituduhkan kepada *Asy'ariyah*, sambil tetap mempertahankan kemahakuasaan Tuhan.
 - c. Tentang *Al-Aslah* (Yang Terbaik): *Maturidiyah* juga menolak gagasan bahwa Tuhan "harus" melakukan yang terbaik (*al-aslah*) seperti *Mu'tazilah*. Mereka menegaskan kemutlakan kehendak Tuhan. Namun, mereka berpendapat bahwa Tuhan, karena sifat Rahman dan Rahim-Nya, secara sukarela memilih untuk melakukan apa yang baik dan bermanfaat bagi makhluk-Nya, bukan karena kewajiban. Tuhan selalu melakukan hikmah (kebijaksanaan).
 - d. Harmonisasi Akal dan Wahyu: *Maturidiyah* dikenal karena upaya mereka untuk menyeimbangkan peran akal dan wahyu. Mereka mengakui pentingnya akal dalam memahami Tuhan dan alam semesta, tetapi tetap menegaskan otoritas wahyu sebagai sumber utama kebenaran. Mereka mengkritik *Mu'tazilah* karena terlalu mengutamakan akal hingga berpotensi menafikan beberapa aspek wahyu (Arif Arif & Nunu Burhanuddin, 2023).

5. Pengaruh pada Peradaban Islam (Fokus Filsafat & Sains)

Kontribusi *Muktazilah* terhadap pengembangan filsafat dan sains dalam peradaban Islam sangatlah fundamental. Metodologi rasional yang mereka kembangkan menciptakan iklim intelektual yang kondusif bagi *florisannya* pemikiran filosofis. Para pemikir seperti al-Kindi, al-Farabi, dan bahkan Ibn Sina, meskipun tidak sepenuhnya mengadopsi teologi *Muktazilah*, namun memanfaatkan kerangka epistemologis yang telah mereka bangun untuk mengembangkan sistem filosofis yang lebih komprehensif.

Dalam bidang sains, penekanan *Muktazilah* pada rasionalitas dan observasi empiris memberikan justifikasi teologis bagi pengembangan metode ilmiah. Konsep *al-tawhid* yang mereka kembangkan tidak hanya bermakna teologis, tetapi juga epistemologis—menyiratkan kesatuan hukum alam yang dapat dipahami melalui akal manusia. Hal ini mendorong para ilmuwan Muslim untuk melakukan investigasi sistematis terhadap fenomena alam, yang pada gilirannya melahirkan karya-karya monumental dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan ilmu-ilmu alam lainnya.

Pengaruh rasionalisme *Mu'tazilah* tidak berhenti pada ranah teologis, melainkan meresap ke dalam struktur budaya masyarakat Islam, terutama pada masa Abbasiyah. Penekanan mereka terhadap akal dan keadilan menciptakan atmosfer sosial yang mendorong dialog terbuka, kritik rasional, dan kebebasan intelektual. Gagasan bahwa manusia memiliki tanggung jawab atas perbuatannya melahirkan etos sosial yang menuntut keadilan dan etika publik. Nilai-nilai ini turut membentuk praktik kehidupan masyarakat perkotaan seperti Baghdad, yang dikenal sebagai pusat kemajuan budaya dan intelektual Islam klasik. Diskursus keagamaan tidak hanya menjadi monopoli ulama, tetapi juga melibatkan para intelektual dan sastrawan, menunjukkan adanya keterbukaan wacana yang khas pada zaman itu.

Dalam bidang sastra, spirit rasional dan kritis *Mu'tazilah* tercermin dalam munculnya genre-genre sastra yang menekankan pesan moral, kritik sosial, dan kebebasan berpikir. Sastra pada periode ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga media penyampaian nilai-nilai etis dan intelektual. Banyak penyair dan penulis memanfaatkan sastra sebagai ruang untuk menyampaikan gagasan keadilan, kemanusiaan, dan kritik terhadap penyalahgunaan kekuasaan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar *Mu'tazilah*. Narasi tentang pertentangan antara akal dan hawa nafsu, antara tanggung jawab manusia dan takdir, serta perdebatan filsafat moral sering kali menjadi tema sentral dalam puisi dan cerita-cerita hikmah yang beredar luas di kalangan masyarakat terdidik.

Lebih jauh, pengaruh *Mu'tazilah* terhadap budaya intelektual juga tercermin dalam berkembangnya tradisi debat ilmiah (*jadal*) dan majelis-majelis diskusi terbuka. Di lingkungan istana maupun masyarakat umum, para cendekiawan dari berbagai mazhab terlibat dalam perdebatan yang tidak hanya memperkaya wawasan keagamaan, tetapi juga memperkuat tradisi berpikir kritis dalam budaya Islam. Semangat ini menumbuhkan kultur yang menghargai argumentasi rasional, bahkan dalam ranah seni dan kesusastraan. Dengan demikian, warisan budaya *Mu'tazilah* telah meninggalkan jejak mendalam dalam peradaban Islam, membentuk sebuah tatanan sosial yang berpijak pada akal, etika, dan dialog – suatu warisan yang relevan hingga kini.

6. Analisis Kontemporer

Pembahasan mengenai keadilan Tuhan, terutama yang dipicu oleh pemikiran *Mu'tazilah*, terus bergema dalam diskursus teologi dan filsafat Islam kontemporer. Di tengah kompleksitas dunia modern, di mana isu-isu seperti ketidakadilan global, penderitaan massal, dan krisis moral semakin menonjol, pertanyaan tentang bagaimana Tuhan yang Maha Adil dan Maha Baik berinteraksi dengan realitas ini menjadi krusial.

a. Problematika Kejahatan (*Problem of Evil*) dan Keadilan Tuhan

Salah satu tantangan terbesar bagi setiap *teodise* (upaya untuk mendamaikan sifat Tuhan yang Maha Baik dan Maha Kuasa dengan keberadaan kejahatan dan penderitaan) adalah problematika kejahatan (*problem of evil*). Konsep *Mu'tazilah* tentang kebebasan berkehendak manusia dan bahwa Tuhan selalu melakukan yang terbaik (*al-aslah*) menawarkan solusi yang relatif "bersih" untuk masalah ini: Kejahatan dan penderitaan sebagian besar adalah hasil dari pilihan bebas manusia, dan Tuhan dalam keadilan-Nya tidak akan menghukum hamba-Nya atas apa yang bukan perbuatan mereka (El-Omari, 2017).

Relevansi Kontemporer: Di era modern, kita dihadapkan pada skala penderitaan yang masif akibat perang, genosida, bencana alam, dan kemiskinan struktural.

- Dari Perspektif *Mu'tazilah*: Pemikiran *Mu'tazilah* dapat digunakan untuk menekankan tanggung jawab moral manusia dalam mengatasi kejahatan dan ketidakadilan yang disebabkan oleh intervensi manusia (misalnya, korupsi, perang). Mereka akan berargumen bahwa perubahan sosial dan perbaikan kondisi manusia harus dimulai dari pilihan dan tindakan individu serta kolektif. Konsep *al-aslah* bisa diinterpretasikan sebagai dorongan bagi manusia untuk aktif mencari solusi terbaik dan optimal dalam setiap situasi, sejalan dengan kehendak Tuhan yang selalu menghendaki kebaikan.
- Tantangan bagi *Mu'tazilah*: Namun, *Mu'tazilah* mungkin kesulitan menjelaskan penderitaan yang bukan akibat langsung dari pilihan manusia, seperti bencana alam atau penyakit genetik. Meskipun mereka mungkin berargumen bahwa penderitaan itu memiliki hikmah ilahiah yang lebih besar atau sebagai ujian, hal ini bisa terasa kurang memuaskan bagi penganut modern yang menuntut kejelasan rasional.
- Kritik Kontemporer: Kritikus, baik dari dalam maupun luar tradisi Islam, seringkali menantang apakah konsep keadilan Tuhan dapat sepenuhnya dipahami jika masih ada penderitaan yang tidak dapat dijelaskan secara rasional oleh tindakan manusia. Mazhab lain, seperti *Asy'ariyah*, mungkin akan kembali pada argumen bahwa keadilan Tuhan melampaui pemahaman akal manusia; apa pun yang Tuhan lakukan adalah adil, terlepas dari bagaimana kita memahaminya. Pendekatan ini, meskipun kokoh secara teologis bagi pengikutnya, mungkin kurang memuaskan bagi mereka yang mencari jawaban rasional dalam menghadapi tragedi (Siddiqi, 2016).

b. Keadilan Sosial dan Etika Pemerintahan

Mu'tazilah dengan penekanan pada keadilan Tuhan dan kebebasan manusia, secara inheren memiliki implikasi terhadap keadilan sosial dan etika pemerintahan. Jika Tuhan itu adil dan manusia bertanggung jawab atas perbuatannya, maka sistem sosial dan politik juga harus mencerminkan prinsip keadilan (Nasr, 1989).

Relevansi Kontemporer: Dalam konteks negara-negara Muslim modern yang berjuang dengan isu-isu korupsi, otoritarianisme, dan kesenjangan sosial, prinsip *Mu'tazilah* dapat menawarkan landasan etika yang kuat.

- Penekanan pada Akuntabilitas: Gagasan bahwa manusia bertanggung jawab penuh atas tindakannya dapat diterjemahkan menjadi akuntabilitas publik bagi para pemimpin dan pejabat. Pemerintahan yang adil adalah cerminan dari keadilan Tuhan yang menghukum orang yang zalim dan memberi pahala orang yang berbuat baik (El-Omari, 2017).
- Reformasi Sosial: Dari perspektif *Mu'tazilah*, setiap upaya reformasi sosial dan penegakan hukum yang adil adalah manifestasi dari pemahaman akan keadilan ilahiah. Mereka akan mendorong penggunaan akal untuk merumuskan kebijakan yang paling adil dan bermanfaat bagi masyarakat.

- Kritik Kontemporer: Di sisi lain, kritik mungkin muncul dari mereka yang berpendapat bahwa idealisme *Mu'tazilah* tentang akal dan keadilan mungkin terlalu optimis mengingat realitas politik yang seringkali diwarnai oleh kekuasaan dan kepentingan. Beberapa mungkin berpendapat bahwa fokus berlebihan pada keadilan rasional dapat mengabaikan peran faktor-faktor lain seperti tradisi, emosi, atau bahkan otoritas wahyu yang kadang-kadang disalahgunakan.

KESIMPULAN

Konsep keadilan Tuhan (*al-'Adl*) adalah pilar fundamental teologi *Mu'tazilah*, sebuah mazhab rasionalis Islam klasik. Berakar pada kebutuhan akan konsistensi akal dalam memahami sifat Tuhan, *Mu'tazilah* menekankan kebebasan berkehendak manusia sebagai prasyarat keadilan ilahiah dalam sistem pahala dan siksa. Mereka meyakini bahwa Tuhan selalu berbuat yang terbaik (*al-aslah*), menegaskan akuntabilitas moral manusia sepenuhnya atas tindakannya.

Namun, penekanan ini menjadi titik kontroversial, memicu kritik tajam dari mazhab lain. *Asy'ariyah* menolak kebebasan berkehendak mutlak manusia, bersikeras bahwa segala perbuatan diciptakan Tuhan dan keadilan-Nya melampaui pemahaman akal. *Maturidiyah* mengambil posisi moderat, mengakui penciptaan Tuhan atas perbuatan namun memberi ruang bagi usaha (*kasb*) manusia.

Meskipun kontroversial, rasionalisme *Mu'tazilah* memiliki pengaruh besar pada peradaban Islam, mendorong perkembangan filsafat dan dialektika. Secara kontemporer, pemikiran *Mu'tazilah* tetap relevan dalam membahas problematika kejahatan dan keadilan sosial, menekankan tanggung jawab manusia. Debat mereka tentang peran akal dan wahyu juga penting dalam dialog antar-agama di era modern. Pada akhirnya, konsep *al-'Adl Mu'tazilah* menjadi cerminan kompleksitas dan kekayaan intelektual Islam dalam memahami hubungan antara Tuhan, manusia, dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baqillani, Abu Bakr Muhammad ibn al-Tayyib. *Kitab al-Tamhid*. Beirut: al-Maktaba al-Sharqiyya, 1957.
- al-Hasan, A. (1950). *Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilaf al-Musallin*. Kairo: Maktabat al-Nahdat al-Misriyya.
- Al-Jubba'i, Abu Ali Muhammad. *Masa'il fi al-Kalam*. Diedit oleh Muhammad Salim Salem. Kairo: Dar al-Kutub al-Haditha, 1982.
- Arif Arif & Nunu Burhanuddin. (2023). "Aliran Dan Pemikiran Kalam Maturidiyah". *Perspektif: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Bahasa*, 1(4), 168-185. <https://doi.org/10.59059/perspektif.v1i4.716>
- Ata', W. i. (n.d.). *Rasa'il fi al-Tawhid wa al-Adl*. Koleksi fragmen dalam Al-Ash'ari, Maqalat al-Islamiyyin.
- Batara, A. M., Santalia, I., & Makassar, U. A. (2025). *AL-ASY'ARIYAH: SEJARAH TIMBUL DAN TOKOH PENTING AL-ASY'ARIYAH*. 6(1).
- El-Omari, A.-G. (2017). *The Problem of Evil in Islamic Thought: A Philosophical Examination*. Routledge.
- Ibn Furak, Muhammad ibn al-Hasan. *Mujarrad Maqalat al-Ash'ari*. Beirut: Dar al-Mashriq, 1987.
- Ikrar, I. (2013). "MANHAJ TAFSIR MU'TAZILAH". *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11(1). <https://doi.org/10.30984/as.v11i1.168>
- Mighfaza, M. H. (2021). "Al-Ushul Al-Khamsah Mutazilah dalam Pandangan KH. Mustain Syafii: Studi Analisis di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang". *Jurnal Pendidikan Islam Ushuluddin*, 224-239. <https://doi.org/10.15575/jpiu.11742>

- Nasr, S. H. (1989). *Knowledge and the Sacred*. State University of New York Pres.
- Netton, I. R. (2013). *Allah Transcendent: Studies in the Structure and Semiotics of Islamic Philosophy, Theology and Cosmology* (0 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203061008>
- SAMBAS, J. (2025). "Historical development of the Mu'tazilite theological school of thought". *Jurnal SAMBAS (Studi Agama, Masyarakat, Budaya, Adat, Sejarah)*. <https://doi.org/10.37567/sambas.v7i2.3274>
- Siddiqi, M. A. (2016). *The Mu'tazilah: An Introduction to Their Thought and its Contemporary Relevance*. Oxford University Press.
- Sulistio, D. S. (2024). "Menerka keadilan Tuhan: Mu'tazilah dan Ahlu Sunnah dalam perseteruan ideologi". *Journal of Applied Transintegration Paradigm*, 1-10.
- Syamsuddin, S. &. (2022). "Implementation of the al-Adl concept in the practice of muzara'ah and mukhabarah in the district's leading agricultural sector Bantaeng South Sulawesi". *Jurnal Diskursus Islam*, 158-171. <https://doi.org/10.24252/jdi.v10i2.30675>
- Syawal Kurnia Putra, Muhammad Amri, & Mahmuddin. (2023). "Aspek-Aspek Ketuhanan dalam Teologi Islam: Analisis Tiga Mazhab: Mu'tazilah, Asyariyah, Al-Maturidiyah". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(3), 180-186. <https://doi.org/10.58540/isihumor.v1i3.239>